

TAJUK RENCANA Larangan Mudik

MUDIK Lebaran Idul Fitri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, Jawa khususnya, sudah dianggap sebagai tradisi. Bahkan selama ini ada sejumlah laku ritual berupa upacara adat yang dilakukan sebagai masyaraat. Namun pada Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 Hijriah ini masyarakat perantau di Indonesia belum bisa mudik lagi, seperti tahun lalu.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan semua lapisan masyarakat dilarang mudik pada Lebaran 2021. Larangan tersebut diberlakukan karena angka penularan dan kasus kematian akibat Covid-19 dinilai masih tinggi. Larangan juga dilandasi pengalaman angka kasus Covid-19 melonjak tinggi setelah ada libur panjang pada Natal dan Tahun Baru.

Sebelumnya, sempat mencuat pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Idul Fitri 1442 Hiriah atau Lebaran 2021. Namun, seperti yang kemudian diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terkait teknis dan detail rencana mudik tahun ini ditentukan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Terkait kemungkinan pemerintah mengizinkan mudik Lebaran 2021 ini, Kementerian Perhubungan sebagai koordinator lalu lintas merasa bertanggungjawab melakukan berbagai kesiapan. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, sarana dan prasarana, tetapi juga harus

memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait penanganan Covid-19, yang memang harus diutamakan.

Sebelum ada keputusan resmi pemerintah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah mengatakan bahwa pemerintah masih akan mempertimbangkan sejumlah dampak mudik, baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan. Apakah mudik Lebaran 2021 boleh dilakukan atau tidak, harus dipertimbangkan seberapa besar dampak negatifnya bagi masyarakat.

Wapres juga sudah mengisyaratkan bahwa pemerintah akan dengan tegas melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran apabila hal itu berdampak pada penularan dan peningkatan angka kasus Covid-19 di Indonesia. Meskipun demikian, Wapres juga masih memberikan harapan, “Kalau memang bisa diminimalkan, tentu ada cara lain, karena mudik memang telah menjadi tradisi masyarakat.”

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak melarang kegiatan mudik pada Lebaran 2021 selama dilakukan sesuai syarat dan ketentuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Prinsipnya, Kementerian Perhubungan tidak akan melarang, tetapi akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik itu diatur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang akan bepergian.

Sekarang sudah hampir ada kepastian, bahwa pemerintah akan melarang aktivitas mudik pada Lebaran 2019. Ini semata-mata karena kesehatan dan keamanan masyarakat memang harus tetap diutamakan. □

Membangun Kampung Berlandasan Masterplan

Y Djarot Purbadi

TAHUN 2020 kota Yogyakarta memulai tradisi baru, membangun kampung dengan instrumen masterplan. Telah tersedia masterplan kampung di kelurahan Karangwaru, Gedongkiwo dan Wirogunan. Ide ini terkesan aneh. Kenapa harus ada masterplan, toh selama ini kehidupan kampung baik-baik saja. Apa istimewanya masterplan untuk membangun kampung?

Keberanian Pak Wawali patut diacungi jempol. Terobosan aneh ini menarik untuk dikupas. Upaya memutus rantai kebiasaan lama dan mengenalkan kehidupan berencana-bersama menuju kampung yang berkualitas-berkelanjutan diyakini penting.

Ironisme Kampung

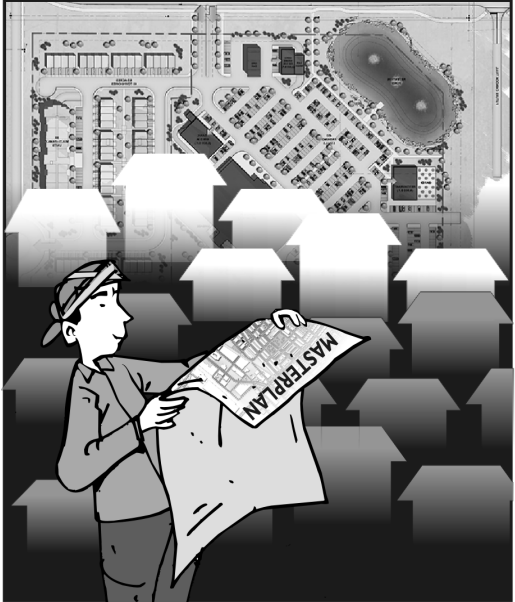
Lazimlah kampung-kampung di Indonesia dipersepsikan buruk. Kampung dihuni orang bercampur-aduk asal-usulnya, beragam jenis pekerjaannya, dan menjadi permukiman informal serta marginal. Sejak era kolonial, kampung identik dengan keterbelakangan, kekumuhan, kemiskinan, dan kurang diperhatikan.

Anehnya, kampung-kampung mendapat perhatian pada masa pemilu. Kampung adalah gudang suara bagi partai-partai. Ketika pemilu tiba, kampung menjadi bernilai dan bersinar. Habis pemilu, kampung menjadi biasa lagi.

Kampung di kota Yogyakarta bermula dari kampung bersejarah. Ada kampung para prajurit kraton, ada kampung para abdi dalem kraton berprofesi tertentu. Ada kualitas dan endapan sejarah di dalamnya. Kampung kita adalah kampung heritage, tetapi ya tetap saja berkembang tanpa arah.

Beberapa kampung berupaya mengangkat nilai sejarah dan budaya kampung. Masalahnya, tindakan itu bersifat perorangan atau kelompok kecil, belum signifikan mengubah kampung. Upaya mereka bersifat parsial dan temporer, belum gerakan warga kampung yg permanen.

Ada jargon arsitektur dari Prof Purnama Salura yang menarik diangkat : arsitektur hendaknya selalu bermakna memberi, bukan meminta. Contohnya,



KR-JOKO SANTOSO

Kampung-kampung perlu membangun secara sadar rantai kehidupan sosial-ekonomi antarkampung. Pada sisi yang lain, kampung-kampung di Yogyakarta perlu melestarikan ikatan simbolis keberadaannya dengan kraton Yogyakarta. Idealnya, kampung menjadi satuan kehidupan dinamis yang menyumbang (bermakna memberi) pada pengembangan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Tradisi Cerdas

Inisiasi tradisi Masterplan Kampung merupakan tradisi baru di Indonesia, minimal bagi kota Yogyakarta. Bisa jadi selama ini sudah ada tradisi masterplan, tetapi mungkin hanya terbatas dokumen. Ya warga kampung mungkin dilibatkan, tetapi lebih sebagai objek sumber data masterplan. Dokumen masterplan memang ada, hasil dari ker-

Seabad Pendidikan Multikultural

Heri Priyatmoko

DI KOLOM ini (18/3), Abdul Latif Muslich menyototi penerapan pendidikan multikultural. Dalam artikel berkepalanya ‘Sinergi Wujudkan Pendidikan Multikultural’, penulis juga mewanti-wanti pentingnya mengajarkan pendidikan multikultural bagi peserta didik sedini mungkin untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika. Pasalnya, masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman budaya.

Sebetulnya pendidikan multikultural yang didengungkan Abdul Latif bukanlah perkara anyar. Mengingat tak lama selepas program Politik Etis digelontorkan, Pemerintah Belanda meluluskan permohonan elite mendirikan sekolah setingkat SMA bernama *Algemene Middelbare School* (AMS). Dimana, AMS B I mengutamakan matematika dan fisika dibuka di Jakarta (1919), dan AMS A II, klasik Barat di Bandung (1920) serta AMS A I klasik Timur di Solo (1926).

Tercatat awal berdiri, sekolah ini merengkuh 100 murid. Mereka dari Ambon, Batak, Padang, Aceh, Betawi, Priyangan, Madura, Sumatra, Bali, dan Jawa bagian tengah, serta kelompok Tionghoa dan Belanda. Fakta historis ini menunjukkan AMS Solo merupakan sekolah favorit kala itu, setidaknya terdengar sampai ke luar Jawa. Surat kabar *Het Nieuws van Den Dag* (29 Agustus 1926) menurunkan berita pemerintah mengangkat Stutterheim sebagai Dewan Direksi untuk Seksi Ilmu Sastra Timur AMS Solo pertengahan 1926. Ia dari Dinas Kepurbakalaan, doktor dalam Sastra-sastra Timur.

Pengetahuan Timur

Stutterheim menyadari pentingnya asupan pengetahuan Timur ke peserta didik. Bahwa kebudayaan Indonesia tidak dibentuk dari pengaruh Barat (Kristen dan Katolik) saja seperti yang di-

ajarkan dalam HIS dan MULO. Di sini-lah, embrio multikultural disemaikan. Secara teoritis, multikulturalisme meliputi suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, juga sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Penilaian terhadap keragaman budaya orang lain, bukan berarti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan itu, melainkan melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi para anggotanya sendiri (Dadang Supardan, 2008).

Stutterheim (1926) mencontohkan materi multikultural. Yakni, sejarah Indonesia kuno mengenai arti seni-bangun dan seni-pahat 2 buah gapura bersayap dari kebudayaan Islam di Desa Sendanguwur. Kedua gapura masing-masing bercokol di pelataran sebelah barat dan utara masjid. Stutterheim menyebut pendirian masjid dilakukan tahun 1507 Caka atau 1585 M. Oleh penduduk setempat, gapura di sisi barat dinamakan *gapura urug-urug* lantaran ambang pintunya dihubungkan dengan bagian bangunan yang merupakan lorong. Di Kantor Pusat Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional, *gapura urug-urug* ditandai dengan huruf B, sedangkan gapura di pelataran utara ditandai huruf E.

Sejarah Kesenian

Dalam konteks sejarah kesenian Indonesia kuno, 2 gapura yang puncaknya tertutup itu lazim dinamakan *paduraksa*. Kedua gapura punya sayap. Dari kacamata sejarah seni ba-

ngun dan seni pahat, kedua gapura bersayap itu mengandung nilai penting. Stutterheim mengatakan, sayap atau *lar* dapat kita hubungkan dengan gambaran matahari, burung matahari, dan burung garuda. Dalam kesusastraan Jawa, *Ardjuna Sasrabahu*, gapura bersayap ini dipersamakan dengan burung garuda yang tengah terbang di angkasa. Kecuali itu, bisa bertemali dengan gambaran *meru* (gunung rumah para dewa).

Soekmono (1970) mengakui, buku *Sejarah Kebudayaan Indonesia* menjadi ‘buku wajib’ di universitas dan SMA merupakan warisan dari kurikulum AMS yang masih lestari hingga kini. Bukan berarti tanpa kelemahan, warisan Stutterheim cenderung pada peninggalan Hindu-Buddha. Demikianlah, pendidikan multikultural di Tanah Air ternyata hampir berusia seabad. Hal ini mestinya direfleksikan, sejauh mana praktik dan dampaknya bagi harmoni budaya di Indonesia. □

*) **Heri Priyatmoko MA**, Dosen Sejarah, Universitas Sanata Dharma

Pojok KR

Cuaca April 2021 diprediksi akan panas, meskipun masih musim hujan.

-- Panas dingin. ***

Masyarakat petani dan mahasiswa menolak rencana impor beras.

-- Utamakan beras lokal. ***

Di masa mademi Covid-19, bersepeda di Yogyakarta makin diminati.

-- Prokes tetap ketat.

Beraks

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwir, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkrk23@yahoo.com, iklandrkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 hari). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.